



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779
Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-001/B.II/2-b/KP.04.1/11/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : EKO PUTRA, SE
NIP : 197601082000031002
Tempat, Tgl Lahir : Padang Batang,, 08-01-1976
Pangkat Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama
Unit Kerja : Inspektorat Jenderal
Masa Kerja, TMT Pensiun : 12 Tahun 1 Bulan, 01-02-2034

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Inspektorat Jenderal Nomor R-1032/IJ/PS.01.3/10/2021 tanggal 10-10-2021 Perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; Berita
2. Acara Pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tanggal 30 April 2021
3. terhadap Sdr. Eko Putra, SE NIP
4. 197601082000031002.

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Sdr. Eko Putra, SE pada saat menjabat sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Wilayah IV terbukti:

- II. 1. Melakukan perbuatan yang mengandung unsur intervensi dalam kegiatan pengadaan langsung dan kegiatan penunjukan langsung terkait kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Lombok Provinsi NTB TA. 2020;
- III. 2. Menerima uang tunai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Kepala MAN 1 Landak pada saat pelaksanaan Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Negeri dsn Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat; dan
- IV. 3. Adanya pemberian sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede pada saat pelaksanaan Audit Kinerja.
- V.

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal untuk dijatuhi hukuman disiplin Tingkat berat berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Sdr. Eko Putra, SE:

- VI. a. kooperatif dalam memberikan keterangan;
- VII. b. tidak memiliki integritas dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi; dan
- VIII. c. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya.

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,
Kepala Biro Kepegawaian
Ketua DPK,